

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai memegang peranan penting dalam mendukung pendapatan negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan secara efektif dan merata. Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan pembiayaan yang cukup, sehingga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program-program Pembangunan tersebut. Sebagai salah satu instrumen kebijakan yang penting, penerapan Pajak Pertambahan Nilai menjadi bagian integral dari strategi pembiayaan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional (Sabara, 2023).

Secara umum, pajak sendiri diartikan sebagai bentuk kontribusi rakyat kepada negara. Pajak digunakan dalam membiayai pengeluaran pemerintah termasuk pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat berperan penting dalam membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan maupun untuk menjalankan pemerintahan. Pajak dan masyarakat saling memiliki hubungan timbal balik bagi kelancaran fungsi negara dan kedua elemen ini perlu berjalan dengan beriringan. Dengan demikian, sistem perpajakan terus disempurnakan oleh pemerintah, agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia (Sabara, 2023).

Peran perpajakan dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara tidak dapat dipungkiri, karena perpajakan merupakan sumber penerimaan negara serta penyumbang dana keuangan negara terbesar. Sekitar 70% penerimaan negara berasal dari pajak (Salamah & Furqon, 2020). Hal ini sesuai dengan pendapat Harap Politisi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan bahwa “Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar bagi negara, penerimaan pajak selalu menempati posisi teratas dalam menyumbang pendapatan negara, sehingga sangat penting dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk menjalankan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah” (Tribunnews, 2019). Oleh karena itu, penerimaan pajak sangat berperan penting bagi negara, karena besarnya pajak dapat berdampak terhadap laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Penerimaan pajak yang berperan penting dalam sumber pendapatan negara selalu menjadi ketergantungan pemerintah. Namun, tingkat kepedulian masyarakat terhadap pajak tidaklah tinggi. Tingkat kepedulian masyarakat sangatlah memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Sumber penerimaan negara dari pajak meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan APBN, penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah Sabara (2023). Dalam triliun rupiah penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp. 1.869,23, tumbuh signifikan sebesar 8,9 persen dibandingkan dengan realisasi pajak tahun 2022 sebesar Rp. 1.716,77

(Aptri Oktaviyoni, 2024). Dari data tersebut diketahui bahwa penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling besar.

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak 2022
(dalam triliun rupiah)

Uraian	Target	Realisasi s/d 31 Desember 2022	Presentase Pencapaian (%)
Pajak Penghasilan	813,7	998,2	122,7
PPN	639,0	687,6	107,6
PBB	20,9	23,3	111,3
Cukai	220,0	226,9	103,1
Pajak Lainnya	11,4	7,7	67,5
Jumlah	1.705	1.944	114,0

Sumber : data diolah dari djp.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data penerimaan pajak di atas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah penerimaan Pajak Penghasilan (PPH). Selain sebagai sumber penerimaan terbesar, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga berperan dalam menjaga stabilitas fiskal negara. Dengan adanya penerimaan pajak yang konsisten dan cukup, pemerintah dapat mengelola keuangan negara dengan lebih efektif dan mengurangi risiko defisit anggaran yang berlebihan. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang stabil juga membantu pemerintah untuk menjaga keseimbangan anggaran dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri (Renata A H, 2016).

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, dijelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai

merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean. Pajak ini diterapkan secara bertingkat pada setiap tahapan produksi dan distribusi. Jadi, setiap nilai tambah dalam peredaran dari produsen ke konsumen akan dikenai pajak. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat memiliki hubungan yang erat, ketika kondisi ekonomi mengalami peningkatan maka akan menghasilkan kenaikan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan ini akan digunakan untuk konsumsi barang dan jasa, dan hal ini akan berakibat pada peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi negara. Menurut Mardiasmo (2011:273), “Aspek Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa kelebihan salah satunya adalah menghilangkan pajak berganda dengan menggunakan tarif tunggal yang memudahkan pelaksanaannya. Selain itu, PPN juga bersifat netral dalam persaingan domestik maupun perdagangan internasional serta pola konsumsi dan juga dapat mendorong ekspor” (Yulianingtyas L D, 2018).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat kepada negara dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Penerimaan pajak pertambahan nilai digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hubungan timbal balik antara pajak pertambahan nilai dengan pendapatan negara mencerminkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung Pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan negara.

Penerimaan pajak pertambahan nilai juga memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya penerimaan pajak yang cukup, pemerintah dapat mengatur kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Penerimaan pajak yang juga memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana secara efisien untuk sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur dan industri. Selain itu, penerimaan pajak pertambahan nilai juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keadilan dan kesetaraan dalam sistem perpajakan. Dengan sistem pajak yang adil dan proporsional, pemerintah dapat memastikan bahwa beban pajak terbagi secara merata di antara seluruh warga negara. Sehingga dengan penerimaan pajak yang adil dapat membantu memperkuat rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Pajak Pertambahan Nilai juga menjadi salah satu jenis pajak yang dikenakan pada kegiatan ekonomi, khususnya pada konsumsi. Dalam arti sempit, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi utama di negara berkembang seperti Indonesia. Semakin banyak kegiatan konsumsi masyarakat maka semakin besar penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diasumsikan bahwa hubungan antara kegiatan ekonomi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat berkaitan. Kegiatan ekonomi menjadi hal yang mendasar bagi kelangsungan hidup suatu negara, karena itu perlu adanya faktor internal dan faktor eksternal untuk memastikan ketersediaan sumber pendapatan yang penting untuk menjalankan roda perekonomian suatu negara. Salah satu sumber

penerimaan utama adalah pajak, dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi konsumsi yaitu PPN.

Dalam sebuah penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Sarmiento J (2016) menyatakan bahwa bahwa tarif pajak sangat relevan, karena tarif pajak meningkatkan pendapatan secara signifikan, bahkan pada tarif pajak minimum. Pemerintah telah menggunakan Pajak Pertambahan Nilai sebagai sumber utama peningkatan pendapatan, karena konsolidasi fiskal. Terdapat juga bukti bahwa administrasi perpajakan dengan tahun penggunaan Pajak Pertambahan Nilai yang lebih lama cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Terakhir, tingkat korupsi yang lebih rendah, kepatuhan yang lebih tinggi, dan sistem hukum dan peradilan yang lebih baik cenderung berdampak positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartanti et al. (2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara Pajak Pertambahan Nilai dengan penerimaan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai maka semakin tinggi penerimaan pajak dalam suatu negara.

Faktor eksternal dipengaruhi oleh keadaan perekonomian negara. Salah satu hal yang dapat terjadi adalah fluktuasi ekonomi. Fluktuasi adalah sebuah keadaan dalam perekonomian yang tidak menunjukkan keteraturan, tetapi perubahan naik atau turun yang dapat terjadi kapan saja. Fluktuasi ekonomi menyebabkan penurunan stabilitas variable ekonomi makro yang dapat berdampak lebih buruk dengan waktu jangka panjang bagi kegiatan perekonomian Indonesia. Apabila penurunan stabilitas ekonomi terus berlanjut, maka daya beli konsumsi, investasi, dan ekspor impor negara akan turun serta berpengaruh pada penerimaan PPN. Adapun variabel ekonomi makro yaitu tingkat inflasi dan

pertumbuhan ekonomi (Renata A H, 2016)

Inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam perekonomian. Untuk menjaga stabilitas, pertumbuhan inflasi selalu diupayakan tetap rendah dan stabil agar tidak berdampak negatif bagi perekonomian. Dan tentunya inflasi memiliki dampak positif dan juga negatif terhadap perekonomian, salah satu dampak positifnya adalah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan dampak negatifnya dapat menurunkan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Ketika tingkat inflasi meningkat, nilai uang masyarakat cenderung menurun, sehingga konsumsi dan transaksi ekonomi dapat berpengaruh. Hal ini berpotensi mengurangi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, karena adanya penurunan aktivitas ekonomi yang dikenai pajak akibat inflasi yang tinggi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Tingkat inflasi memiliki pengaruh pada transaksi ekonomi yang menjadi objek PPN. Masalah inflasi telah menarik perhatian masyarakat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi mencapai 5,51% pada Desember 2022 yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan inflasi tahun 2021 dan lebih tinggi dari sasaran, hal ini dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022 (Agnes Theodora, 2023).

Penelitian tentang pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Asiah N et al. (2023) menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh inflasi yang disebabkan karena jumlah penduduk di wilayah Kawasan industri yang banyak berdatangan dari luar

daerah menyebabkan tingkat konsumsi yang tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianingtyas L D (2018) menyatakan dalam hasil uji parsial inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanto E & Rohman S (2018) menyatakan bahwa tingkat penerimaan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan juga penerimaan pajak cenderung fluktuatif, dikarenakan banyaknya dampak dari faktor internal maupun eksternal. Salah satunya adalah pergantian kepemimpinan pada periode yang dimana penerimaan pajak daerah yang belum tercapai.

Dalam penelitian internasional di Nigeria yang dilakukan oleh Olatunji O C (2013) menyatakan bahwa tingkat inflasi tidak ada hubungannya dengan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini berarti penerapan Pajak Pertambahan Nilai tidak akan menyebabkan perubahan harga relatif karena konsumen menyesuaikan diri dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga apabila tarif pajaknya tinggi dan basisnya luas, maka akan terjadi kenaikan harga secara umum dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Matthew A S et al. (2021), yang menyatakan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai akan menyebabkan perubahan positif dan signifikan pada tingkat inflasi di Nigeria.

Variabel ekonomi makro selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi yang berperan dalam menjamin keberlangsungan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kejadian ekonomi yang bersifat jangka panjang dan merupakan sumber utama dalam meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemajuan atau

perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Peacock dan Wiseman, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu masalah jangka panjang yang harus diupayakan oleh setiap negara dengan harapan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat. Setiap negara memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana cara mempercepat pertumbuhan ekonominya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi dapat berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diiringi dengan peningkatan transaksi ekonomi dan investasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak pajak pertambahan nilai untuk mendukung pembangunan dan program-program pemerintah. Salah satu indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Suatu negara dapat dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif, apabila kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan negara tersebut mengalami kenaikan(Krisnafani D, 2022).

Pada penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Krisnafani D (2022) menyatakan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan penelitian yang dilakukan Maulidya H A et al. (2021) menyatakan bahwa secara parsial

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarjono N et al. (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Dalam penelitian internasional yang dilakukan oleh Zeng K et al. (2013), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap jumlah total penerimaan pajak dan strukturnya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, hubungan antara pertumbuhan total penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi stabil, tanpa mengalami lonjakan atau penurunan drastis. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Taha R et al. (2011) mengenai peran pertumbuhan ekonomi dalam mendorong penerimaan pajak pemerintah di Malaysia, secara teoritis dan empiris telah terbukti bahwa pajak mempengaruhi alokasi sumber daya dan seringkali mendistorsi pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara pertumbuhan ekonomi dan total penerimaan pajak pemerintah dalam jangka pendek untuk mencapai tingkat keseimbangan dalam jangka panjang.

Faktor internal untuk menjamin keberlangsungan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan. Dalam keberlangsungannya diperlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait. Sehingga ditanamkan sikap yang tertib dan patuh bagi wajib pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai. Apabila dilihat dari sisi wajib pajak dalam hal pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai salah satunya adalah wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam artian, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

(UU No.42 Tahun 2009). Peran pengusaha kena pajak juga memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pengusaha yang patuh dan mematuhi aturan perpajakan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak. Sebaliknya, pengusaha yang tidak patuh atau melakukan tindakan penghindaran pajak dapat merugikan penerimaan pajak pertambahan nilai dan keuangan negara secara keseluruhan (Renata A H, 2016).

Kesadaran pajak dari pengusaha kena pajak juga mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Pengusaha yang memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan berkeadilan. Selain itu, perubahan kebijakan perpajakan juga dapat berdampak pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Perubahan aturan perpajakan yang tidak terduga atau bersifat retrospektif dapat mempengaruhi kepatuhan pajak pengusaha dan pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, stabilitas kebijakan perpajakan menjadi sangat penting dalam menjaga konsistensi penerimaan pajak pertambahan nilai. Sehingga semakin banyak Pengusaha Kena Pajak yang patuh menjalankan kewajibannya dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan semakin meningkat.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianingtyas L D (2018) yang menyimpulkan hasil penelitian bahwa pengujian secara parsial Pengusaha Kena Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Riftiasari D (2023) menyatakan bahwa secara parsial jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap PPN. Penelitian lain

mengenai Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan oleh Harianto H et al. (2020) menyatakan bahwa kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat meningkat dengan adanya penerapan e-faktur yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Selain meningkatkan wajib pajak, e-faktur dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan sistem yang efektif dan efisien dapat meningkatkan jumlah Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Banyak faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Variabel seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengusaha kena pajak yang memiliki hubungan erat dengan hal tersebut. Ketiga variabel ini termasuk data yang fluktuatif dan dapat mempengaruhi penerimaan PPN secara langsung maupun tidak langsung. Inflasi memiliki dampak global karena mempengaruhi harga barang. Peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat yang merupakan pertumbuhan ekonomi juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini sangat penting karena Pajak Pertambahan Nilai memiliki peran yang besar sebagai sumber penerimaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana ketiga variabel tersebut mempengaruhi besaran Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penelitian ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA PADANG I”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh inflasi terhadap besaran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Padang I.
2. Inflasi dapat mempengaruhi nilai barang dan jasa, serta daya beli konsumsi, sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi besaran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Padang I.
4. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan konsumsi dan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Peran pengusaha kena pajak dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Padang I.
6. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat meningkatkan basis pajak PPN dan potensi kenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
7. Faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengusaha kena pajak saling berinteraksi dalam mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.3 Batasan Masalah

Pada latar belakang dan identifikasi masalah telah dikemukakan masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas dan terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengusaha kena pajak yang secara dominan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang I.

1.4 Rumusan Masalah

Agar penelitian benar-benar terfokus maka perlu dibuat rumusan masalah dari permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan lebih lanjut. Adapun masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Padang I?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Padang I?
3. Apakah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Padang I?
4. Apakah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Padang I?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap besaran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara pengusaha kena pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Untuk mengidentifikasi faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap

besaran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai seperti: inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengusaha kena pajak dalam konteks KPP Pratama Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1) Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dan juga dapat mengasah keterampilan analisis data dan metode penelitian dalam konteks perpajakan.

2) Bagi KPP Pratama Padang I

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di wilayah tersebut. Dan memungkinkan dalam pengambilan keputusan untuk merencanakan strategi fiskal yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan.

3) Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyediakan informasi penting untuk merancang kebijakan ekonomi dan fiskal yang tepat sasaran dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Dan memberikan dasar empiris untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan ekonomi terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengusaha kena pajak.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti sebagai landasan teoretis maupun hasil empiris dalam melakukan penelitian yang sama. Dan juga dapat menginspirasi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.